

Media Cetak	Harian Fajar
Tanggal	Senin 17 Februari 2025
Wilayah	Kabupaten Bone



Bone Masih Terlilit Utang Jumbo Tahun Lalu

Bone Masih Terlilit Utang Jumbo Tahun Lalu

REPORTER **ASHARI P NEGARA**
EDITOR **RIDWAN MARZUKI**

BONE, FAJAR – Utang Pemkab Bone tahun lalu menyeberang. Hingga tahun ini tak kunjung lunas.

BONE mengalami defisit fiskal besar. Bersama Enrekang, kedua daerah ini terbebani utang peninggalan era sebelumnya. TPP pegawai dan pembayaran kontraktor masih menunggak.

Utang-utang ini membuat Pemkab Bone kelabakan. Apalagi, ratusan miliar rupiah dana transfer pusat dipangkas imbas efisiensi. Kondisi ini diperparah masalah defisit anggaran yang

cukup besar.

Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bone Budiono mengatakan di tengah sulitnya masalah keuangan yang dihadapi, pihaknya akan tetap memprioritaskan penyelesaian utang.

"Yang jelas ini urusan wajib, tetap kita perhatikan. Termasuk dengan penyelesaian utang," ujar Budiono, Minggu, 16 Februari 2025.

Penyelesaian utang ini harus dirampungkan Pemkab tahun ini, atau beban tersebut akan berlanjut pada 2026.

Sementara itu, Pemkab masih memiliki sejumlah utang di antaranya utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), utang Pilkada yang sebelumnya diselesaikan oleh pusat, kegiatan fisik oleh pihak ketiga, dan tunggakan Universal Coverage Helath (UHC) di BPJS Kesehatan.

Efisiensi anggaran ini akan cukup berdampak pada program 2025. Makanya, akan ada penyelesaian kembali program-program yang telah dike-

tuk pada APBD 2025 pada pembahasan anggaran parsial saat ini.

"Dana transfer ini berkurang, otomatis memengaruhi lagi masalah defisit. Jadi kita akan lakukan penyesuaian di parsial, ada perubahan program, dan kita sesuaikan dengan pusat termasuk dengan pemangkasan operasional," jelasnya.

Sementara itu masalah keuangan yang dihadapi oleh Pemkab Bone ini kemudian dikeluhkan oleh Ketua Asosiasi Kontraktor Bone, Eko Wahyudi. Defisit fiskal mematikan para pengusaha.

Terlebih masih banyak utang yang ditanggung oleh

pemkab, baik dari proyek 2023 maupun 2024 yang belum diselesaikan. "Kami sebagai kontraktor mengandalkan penganggaran pada pemerintah daerah. Kalau semua dipangkas, tentunya mematikan rezeki kami," ujarnya.

Ia mengharapkan adanya kebijakan dari bupati yang baru. Kendati ini menjadi kebijakan pusat yang berlaku di seluruh daerah.

"Langkah apa yang harus diambil atau jaminan apa yang akan diberikan kepada kami selaku pengusaha agar tidak mematikan sumber penghasilan kami, semoga ada solusi bagi kami," sambung Eko. (an/zuk)